

MEMBANGUN MODEL TATA KELOLA STRATEGIS DALAM STRATEGI PENINGKATAN INFORMASI KEIMIGRASIAN MELALUI EXPO DAN KONFERENSI DI INDONESIA, PENDEKATAN METODOLOGI SOFT SYSTEM

*(Building A Model of Strategic Governance in Immigration Information Improvement
Strategies Through Expo and Conferences in Indonesia,
A Soft System Methodology Approach)*

Aditya Sarsito^{1,2}, Rachma Fitriati¹

¹ Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Email: rachma.fitriati@ui.ac.id

Diserahkan: 26-06-2023; Diterima: 06-11-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.289-308>

ABSTRACT

In Indonesia, exhibitions and conferences on employment, tourism, or business are still organized separately and, therefore, need to be better integrated. These exhibitions and conferences contrast with the multi-dimensional nature of the immigration process itself. The organization of immigration services is always in a state of high dynamics because the immigration function is directly related to the mobility of people who are always pursuing change. This study aims to analyze the strategic governance model in increasing immigration information through exhibitions and conferences. This study uses soft systems methodology or SSM in modeling immigration-related activities. SSM is suitable to be used in this study because it can see complex social situations and involve various points of view. The results of the study show that it is necessary to establish an international mega event, namely the Indonesian Immigration Expo and Conference, as a forum for integrated strategic governance and collaborative governance to provide correct information about immigration in Indonesia. In addition, with the enactment of Government Regulation No. 40 of 2023 on immigration in the form of the "Golden Visa" policy, changes in the period of granting visas and residence permits are expected to attract more foreign investment. This grand international event is expected to act as a social network as it brings together embassies, business people, universities, and tourism agents in one place. This study recommends stakeholder engagement in encouraging strategic governance design and collaborative governance for each stakeholder.

Keywords: Collaborative Governance; Immigration; Mega-Event, Expos, and Conference; Soft Systems Methodology; Strategic Governance, Golden Visa.

ABSTRAK

Di Indonesia, expo dan konferensi mengenai ketenagakerjaan, pariwisata, atau bisnis masih diorganisir secara terpisah dan, maka dari itu, perlu diintegrasikan dengan lebih baik. Kegiatan-kegiatan expo dan konferensi ini kontras dengan sifat multidimensional dari proses keimigrasian. Organisasi layanan keimigrasian selalu berada dalam dinamika tinggi karena fungsi dari keimigrasian secara langsung terkait dengan mobilitas orang yang selalu mengejar perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model tata kelola strategis dalam meningkatkan informasi keimigrasian melalui expo dan konferensi. Studi ini menggunakan metodologi soft system atau SSM dalam pemodelan aktivitas terkait imigrasi. SSM cocok digunakan dalam penelitian ini karena

dapat melihat situasi sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai sudut pandang. Hasil studi menunjukkan bahwa diperlukan pendirian sebuah acara besar internasional, yaitu Indonesia Immigration Expo and Conference, sebagai forum tata kelola strategis terintegrasi dan tata kelola kolaboratif untuk menyediakan informasi yang benar tentang keimigrasian di Indonesia. Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2023 tentang imigrasi dalam bentuk kebijakan “Golden Visa,” perubahan dalam periode pemberian visa dan izin tinggal diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing. Acara internasional besar ini diharapkan berfungsi sebagai jaringan sosial karena mengumpulkan kedutaan, pengusaha, universitas, dan agen pariwisata dalam satu tempat. Studi ini merekomendasikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendorong desain tata kelola strategis dan tata kelola kolaboratif untuk setiap pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif; Imigrasi; Acara Besar, Pameran, dan Konferensi; Metodologi Perangkat Lunak; Tata Kelola Strategis, Visa Emas.

1. PENDAHULUAN

Dalam teori dekade terakhir, terdapat pendekatan berbeda untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana menyederhanakan tata kelola dan manajemen sektor publik.¹ Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa salah satu alat untuk mengefektifkan tata kelola pemerintahan adalah melalui ‘tata kelola strategis’ dan ‘manajemen strategis dalam masyarakat. Asumsi ini berasal dari perluasan dan maksud konsep ‘pemerintahan yang baik’.² Tata kelola dan manajemen strategis sebenarnya adalah instrumen untuk mempengaruhi masa depan yang lebih baik dan menerapkannya melalui ‘rencana strategis’³. Kegiatan tersebut dapat dipenuhi berdasarkan prinsip tata kelola strategis dan manajemen strategis⁴. Tata kelola strategis dalam konteks keimigrasian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Keimigrasian menyebabkan adanya pergeseran tata kelola strategis dalam pemberian visa tinggal terbatas atau yang dikenal dengan Golden Visa. Skema golden visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing di berbagai instrumen, baik dana investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan, maupun properti.

Berdasarkan laporan Worldometers, tercatat Indonesia menduduki peringkat pertama negara dengan jumlah penduduk terpadat di Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk 273,52 juta jiwa.⁵ Tingginya angka tersebut tentunya berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan, terutama perekonomian, pendidikan, dan pariwisata. Dari segi perekonomian, banyaknya penduduk menyebabkan ketersediaan lapangan kerja semakin terbatas sehingga mendorong mereka untuk melakukan migrasi ke negara lain.⁶ Tak hanya untuk

- 1 M De Vries and J Nemec, “Public Sector Reform: An Overview of Recent Literature and Research on NPM and Alternative Paths,” *International Journal of Public Sector Management* 26, no. 1 (2013): 4–16.
- 2 OECD.org, *Public-Private Cooperation Tools: Build Trust Strategic Governance*, 2022, <https://www.oecd.org/trade/resilient-supply-chains/strategic-governance/>. diakses tanggal 3 November 2023
- 3 Y Dror, “Strategic Brain for Central Government,” in *The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe* (Bratislava: NISPACE, 2004). hal 15–27.
- 4 M Potůček and Přikryl J., “Strategické Vládnutí a Česká Republika Poroce 1989. [Strategic Governance and the Czech Republic after 1989],” in *Potůček, M. et Al. Strategické Vládnutí a Česká Republika. (Strategic Governance and the Czech Republic)* (Praha: Grada, 2007). hal 125–136.
- 5 Worldometers, “South-Eastern Asia Population,” <https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/>. diakses tanggal 13 Oktober 2023
- 6 Achmad Setiawan, “Implementasi Fungsi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Implementation of Immigration Function for Protection of Indonesian Migrant Workers),” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 1 (2020): 1–11, <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/109>. thus causing some citizens choose to become migrant workers in order to support their families. Along with the increase in the flow of migrant workers, it is also equivalent to the emergence of various problems related to migrant workers. Therefore, the Government needs to take steps to protect Indonesian migrant workers. In this paper, the author discusses the role of the Directorate General of Immigration in the implementation of the chess function of immigration for Indonesian migrant workers, while among others the Prevention of Non-Procedural PMI, facilities for migrant workers in border areas, and also supervision for PMI abroad. The method used is Empirical Juridical, which links the legal basis in this case the regulation of laws relating to the facts that occur in the community.”, “author”: [“dropping-particle”: “”, “family”: “Setiawan”, “given”: “Achmad”, “non-dropping-particle”: “”, “parse-names”: false, “suffix”: “”], “-container-title”: “Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian”, “id”: “ITEM-1”, “issue”: “1”, “issued”: {“date-

memperoleh perekonomian yang layak, migrasi masyarakat Indonesia ke luar negeri juga dilatarbelakangi oleh pendidikan. Menurut data UNESCO Institute of Statistics, pada tahun 2021, terdapat 53.604 pelajar Indonesia yang melanjutkan studi ke luar negeri, dan diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya.⁷ Oleh karena itu, minat masyarakat Indonesia untuk berwisata ke luar negeri bisa dikatakan cukup tinggi. Motivasi tersebut juga didukung oleh alasan lain yaitu alasan pekerjaan dan bisnis, pengobatan di rumah sakit luar negeri, atau liburan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, dilaporkan sekitar 45,91% dari 2,92 juta perjalanan ke luar negeri masih didorong oleh alasan rekreasi atau liburan.⁸ Besarnya kontribusi imigrasi terhadap pendapatan negara terlihat dari data Humas Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyebutkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai angka paling signifikan sepanjang sejarah keimigrasian yakni Rp 4,5 triliun. Angka tersebut didominasi pendapatan layanan visa yang mencapai Rp 2 triliun.⁹

Sayangnya, belum banyak platform yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan imigrasi. Tidak ada kegiatan seperti expo dan konferensi yang dapat mempertemukan banyak kedutaan dan masyarakat secara langsung untuk bertukar informasi secara efisien. Selama ini expo dan konferensi terkait ketenagakerjaan, pariwisata, atau bisnis di Indonesia masih diselenggarakan secara terpisah sehingga perlu diintegrasikan dengan baik. Expo dan konferensi ini kontras dengan sifat multidimensi dari proses imigrasi itu sendiri.^{10 11} Penyelenggaraan pelayanan keimigrasian selalu berada dalam dinamika yang tinggi karena fungsi keimigrasian berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat yang senantiasa mengejar perubahan.¹² Sementara itu, negara lain, seperti Hong Kong, Australia, dan Kanada, menyelenggarakan Immigration Expo yang terintegrasi dengan berbagai peserta, seperti lembaga pendidikan, perekrut, pemerintah, dan dunia usaha, untuk memfasilitasi networking dengan peserta. Melihat kesiapan negara-negara tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis tindakan yang tepat terkait permasalahan imigrasi di Indonesia dengan pendekatan metodologi *soft system*.

Salah satu kebijakan utama Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly mengatakan, strategi diversifikasi jenis

parts”:[“2020”]],,”page”.”1-11”,,”title”.”Implementasi Fungsi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Implementation of Immigration Function for Protection of Indonesian Migrant Workers

- 7 Vania Rossa, “Indonesia Jadi Salah Satu Negara Dengan Jumlah Siswa Belajar Di Luar Negeri Terbanyak Di Tahun 2021,” <https://www.suara.com/lifestyle/2022/07/25/121810/Indonesia-Jadi-Salah-Satu-Negara-Dengan-Jumlah-Siswa-Belajar-Di-Luar-Negeri-Terbanyak-Di-Tahun-2021>, July 2022. diakses tanggal 10 Oktober 2023
- 8 Dwi Hadya Jayani, “Berlibur, Tujuan Utama Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri Saat Pandemi,” *Databoks*, last modified December 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/29/berlibur-tujuan-utama-penduduk-indonesia-ke-luar-negeri-saat-pandemi44>. diakses tanggal 17 Oktober 2023
- 9 Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, “Siaran Pers : Imigrasi Cetak PNBP 4,5 Triliun Dan Sederet Terobosan Layanan Di Tahun 2022” (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, December 2022), <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/12/30/siaran-pers-imigrasi-cetak-pnbp-45-triliun-dan-sederet-terobosan-layanan-di-tahun-2022/>. diakses tanggal 3 Nopember 2023
- 10 Andreas Diedrich, Ulla Eriksson-Zetterquist, and Alexander Styhre, “Sorting People out: The Uses of One-Dimensional Classificatory Schemes in a Multi-Dimensional World,” *Culture and Organization* 17, no. 4 (2011): 271–292, e: <https://www.tandfonline.com/loi/gscs20>.
- 11 Wayne K D Davies, “Festive Cities: Multi-Dimensional Perspectives,” *Theme cities: solutions for urban problems* (2015): 533–561, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9655-2_14.
- 12 M Iman Santoso, “Applying Interactive Planning on Public Service Leadership in the Directorate General of Immigration Indonesia,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 169 (January 2015): 400–410, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815003638>. the public sector is being under pressure to improve the service and be able to work with other sectors more effectively and efficiently. This is due to the high expectations of the people to obtain services from public sector organizations. As the result, the leaders of public sector organizations are required to carry out bigger duties and responsibilities. It includes the implementation of Indonesian immigration functions being performed by The Directorate General of Immigration, Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. Immigration in Indonesia itself has a unique character, because in terms of its geographical condition, Indonesia is a the largest archipelagic state in the world for its large width of seas and numbers of islands, which affects the expansion of the immigration service. The main question is what kind of leadership that is needed to control the high dynamics of immigration in Indonesia? This study aims to describe the interactive planning (Ackoff, 2001, Asmui and Fitriati 2013

visa yang selaras dengan tren saat ini dapat dilakukan untuk mengakomodasi hal tersebut. Namun hal ini harus didahului dengan penelitian menyeluruh, termasuk perbandingan dengan negara lain.¹³ Laju pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh faktor utama yaitu faktor produksi dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Sebuah studi lintas negara yang dilakukan oleh Eifert menemukan bahwa tingkat investasi korporasi di negara-negara yang relatif miskin meningkat sekitar 0,6 persen, dan perekonomian tumbuh sekitar 0,4 persen lebih cepat pada tahun tersebut setelah reformasi peraturan *Doing Business*.¹⁴ Hal ini berarti bahwa perbaikan memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan *output* yang lebih besar pada tingkat input yang sama, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan pada akhirnya menghasilkan Produk Domestik Bruto yang lebih besar. Menurut Schumpeter, kewirausahaan melalui inovasi dan kreativitas merupakan faktor kunci dalam perekonomian. Output inovasi yang dihasilkan oleh wirausahawan inilah yang ditekankan Schumpeter sebagai keunggulan kompetitif dan penggerak ekonomi.¹⁵ Inovasi bisnis tersebut antara lain berupa barang berkualitas yang belum pernah ditemukan, inovasi berupa metode bisnis yang efektif, dan perluasan pasar untuk meningkatkan ekspor dan sumber daya ekonomi lainnya. Imigrasi memiliki elemen multidimensi yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan kebijakan strategis. Perlu adanya tata kelola kolaboratif atau tindakan badan-badan publik yang saling berhubungan dalam pengambilan keputusan yang formal dan berorientasi pada konsensus.¹⁶ Perlu dilakukan kolaborasi yang intens untuk memastikan masing-masing pihak saling bergantung dan adaptif.¹⁷ Hal ini juga didukung dengan berkembangnya pengetahuan yang semakin terspesialisasi dan tersebar secara kompleks sehingga mendorong budaya kolaborasi. Menurut Ansell & Gash¹⁸, *Collaborative Governance* merupakan strategi tata kelola yang mengintegrasikan pemangku kepentingan terkait untuk berkumpul dalam suatu forum dan membentuk kesepakatan bersama dalam bentuk kebijakan publik. Faktor kunci dalam penerapan kemitraan publik-swasta adalah meningkatkan akses terhadap layanan, terutama bagi masyarakat marginal, meningkatkan kualitas layanan, dan memuaskan masyarakat yang terlibat. Keberhasilan penerapan suatu sistem akan ditentukan berdasarkan penerapan budaya kolaborasi dan komitmen yang solid dalam sebuah tim^{19 20}

-
- 13 Antaranews.com, "Human Resource Development and Economic Improvement Become Immigration Priorities," last modified January 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3365703/pengembangan-sdm-dan-peningkatan-ekonomi-jadi-prioritas-imigrasi>. diakses tanggal 27 Oktober 2023
 - 14 Benjamin P. Eifert, *Do Regulatory Reforms Stimulate Investment and Growth? Evidence from the Doing Business Data, 2003-07* (Washington D.C, 2009), <http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1420894>. investment and employment creation is an old topic in economics. This study utilizes a five-year panel of data on regulations and procedures from the World Bank's Doing Business project, along with Arellano-Bond dynamic panel estimators, looking for evidence that regulatory reforms lead to higher aggregate investment rates (roughly, factor demand diakses tanggal 23 Oktober 2023
 - 15 Karol Śledzik, "Schumpeter's View On Innovation And Entrepreneurship Schumpeter's View On Innovation And Entrepreneurship," *Management Trends in Theory and Practice* (2013), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257783. diakses tanggal 13 Oktober 2023
 - 16 Chris Ansell and Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–571, <https://academic.oup.com/jpart/article/18/4/543/1090370>.
 - 17 Alwi and Gita Susanti, "Effectiveness of Managing Network Structure Through Local Collaborative Governance Capacity in The Implementation of Food Security Policy in Indonesia," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 6 (2022): 4496–4504, <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/8235>.
 - 18 Chris Ansell and Alison Gash, "Collaborative Platforms as a Governance Strategy," *Journal of Public Administration Research and Theory* 28, no. 1 (2018): 16–32, <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044157457&doi=10.1093%2Fjpart%2Fmux030&partnerID=40&md5=128b8acac0625ea95c2ad78faf064a62>
 - 19 et al., "Public-Private Partnership in Primary Health Care: An Experience from Iran," *Primary Health Care Research and Development* 24, no. 3 (January 2023), <https://www.cambridge.org/core/journals/primary-health-care-research-and-development/article/publicprivate-partnership-in-primary-health-care-an-experience-from-iran/>.
 - 20 E.T. Devi et al., "Designing an Information-Sharing System to Improve Collaboration Culture: A Soft Systems Methodology Approach in the Digital Service Creation Process," *Journal of Enterprise Information Management* 36, no. 5 (2023): 1240–1269, <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-08-2022-0294/full/html>.

Penelitian ini juga menggunakan konsep Mega-Event berupa expo yang dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran, durasi, dampak, jangkauan global, dan signifikansinya.²¹ Menurut Muller, mega event merupakan suatu momen dengan durasi yang tetap, yang (a) menarik banyak pengunjung, (b) mempunyai jangkauan yang luas, (c) memakan biaya yang cukup besar, dan (d) mempunyai dampak yang besar pada lingkungan hidup dan populasi.²² Sebagai bentuk kegiatan yang menarik pengunjung secara global, acara besar dapat secara efektif mendorong pariwisata, meningkatkan perekonomian, dan merayakan budaya negara tuan rumah. Mega-event dapat meningkatkan kesadaran negara tuan rumah sebagai penyelenggara, mendorong pertukaran budaya, dan melestarikan budaya lokal itu sendiri.²³ Hal ini berpotensi mempengaruhi minat investor asing untuk melakukan kerja sama ekonomi yang menguntungkan para pelaku usaha di negara tuan rumah. Expo merupakan salah satu bagian dari mega event yang mampu menawarkan berbagai macam manfaat yang diinginkan masyarakat sebagai penikmat pengalaman baru.²⁴ Kesrul menyatakan, MICE atau Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition merupakan kegiatan dengan unsur pariwisata yang memadukan rekreasi dan bisnis dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat secara kolaboratif. Indonesia sendiri berada di peringkat kesebelas sebagai negara penyelenggara pertemuan dan konferensi di kawasan Asia Pasifik.²⁵ Oleh karena itu, sebuah mega event harus dibangun dari kolaborasi dan kerjasama untuk mencapai efektivitas.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Ruth Ellen Wasem pada tahun 2018 berjudul “Immigration Governance for the Twenty-First Century.”²⁶ Penelitian ini membahas tentang tantangan yang dihadapi sistem imigrasi Amerika Serikat, khususnya mengenai tata kelola imigrasi. Hal ini mengidentifikasi struktur administrasi saat ini dan memberikan pilihan untuk meningkatkan tata kelola imigrasi dengan menggunakan hierarki kebutuhan Maslow dan piramida makanan Departemen Pertanian Amerika Serikat untuk mengembangkan pilihan perbaikan. Beberapa perbaikan ini mencakup prosedur pemeriksaan visa yang ketat, prioritas penegakan “kualitas hidup”, dan program integrasi yang dapat diakses.

Kajian kedua yang dijadikan acuan adalah kajian yang dikembangkan oleh Alexander Gunn dengan judul “Immigration and Integration Policies and the Complexities of Multilevel Governance: A Case Study of British Columbia” yang ditulis pada tahun 2020.²⁷ Kajian ini memberikan informasi baru mengenai kompleksitas multilevel governance tentang kebijakan integrasi dan imigrasi, khususnya dalam kasus British Columbia. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi multilevel dapat mendistribusikan tanggung jawab pemerintah di berbagai tingkat, mengoordinasikan kebijakan terkait proses imigrasi lintas batas, dan mengintegrasikan

-
- 21 John Horne, “The Four ‘Knowns’ of Sports Mega-Events,” *Leisure Studies* 26, no. 1 (January 2007): 81–96, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02614360500504628>.
 - 22 Martin Müller, “What Makes an Event a Mega-Event? Definitions and Sizes,” *Leisure Studies* 34, no. 6 (November 2015): 627–642, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02614367.2014.993333>.
 - 23 Ying Wang and Xin Jin, “Event-Based Destination Marketing: The Role of Mega-Events,” *Event Management* 23, no. 1 (2019): 109–118, <https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/384421/Wang207630.pdf?sequence=1>. enhance the awareness of the destinations, encourage cultural exchange, and promote the preservation of local culture. This study adopts a narrative review method to indicate research production in the field of the effect of event-based destination marketing. The review proposes an event-based destination marketing model to delineate how event, destination, and market characteristics, as well as the degree of collaboration between event committee and destination marketing organization (DMO)
 - 24 Choong Ki Lee, Soo K Kang, and Yong Ki Lee, “Segmentation of Mega Event Motivation: The Case of Expo 2010 Shanghai China,” *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 18, no. 6 (September 2013): 637–660, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10941665.2012.695287>.
 - 25 Christina L Rudatin, Annisa Wardhani, and Fauzi Mubarak, “Analisis Kriteria Destinasi Penyelenggaraan Wisata Bisnis (MICE) Pada Masa Pandemi COVID-19,” in *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, ed. Politeknik Negeri Jember, vol. 7 (Indonesian Society of Applied Science (ISAS), 2021), 196–207, <https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/1046>.
 - 26 Ruth Wasem, “Immigration Governance for the Twenty-First Century,” *Journal on Migration and Human Security* 6, no. 1 (2018): 97–120, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/233150241800600105>.
 - 27 Alexander Gunn, “Immigration and Integration Policy and the Complexity of Multi-Level Governance: A Case Study of British Columbia,” *Journal of Borderlands Studies* 35, no. 4 (August 2020): 603–618, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08865655.2019.1619472?journalCode=rjbs20>.

migran ke negara tuan rumah. Kolaborasi sangat penting karena memungkinkan berbagai tingkat pemerintahan untuk berbagi tanggung jawab dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Terakhir, pada artikel penelitian ketiga yang berjudul “Segmentasi Motivasi Mega Event yang bertujuan untuk menganalisis faktor motivasi pengunjung Shanghai World Expos 2010, ditemukan enam faktor yang memotivasi pengunjung expo: (1) eksplorasi budaya, (2) kebersamaan keluarga, (3) atraksi acara, (4) sosialisasi, (5) kebaruan, dan (6) pelarian.²⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa “kebersamaan keluarga” dan “eksplorasi budaya” merupakan faktor paling signifikan yang mendorong motivasi pengunjung. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mengidentifikasi motivasi pengunjung untuk menghadiri program acara sangat penting untuk mencapai strategi komunikasi pemasaran yang efektif.

Dibandingkan ketiga penelitian di atas, kebaruan dalam penelitian ini adalah peneliti fokus pada kebijakan integrasi informasi melalui Mega Event, khususnya Expo dan Konferensi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pengembangan mega event ini didasarkan pada penelitian Lee dan menggali wawasan yang diperoleh dari penelitian a dan b. Meskipun tiga penelitian sebelumnya telah mengkaji kolaborasi dalam sistem imigrasi, namun belum ada penelitian yang memberikan rekomendasi tindakan berupa International Immigration Expo and Conference sebagai one stop platform yang memiliki pengalaman langsung. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas perkembangan perubahan aksi peningkatan penyebaran informasi terkait sistem keimigrasian melalui program Expo dan Conference dengan pendekatan soft system.

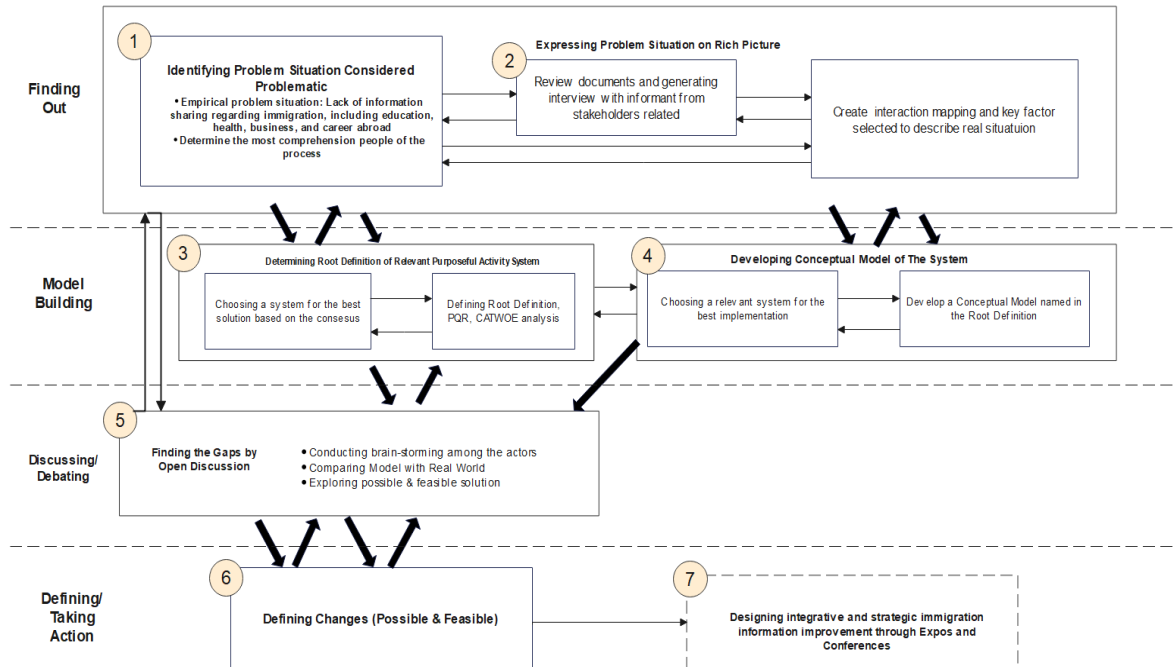
2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi soft system atau SSM dalam memodelkan kegiatan terkait imigrasi. Pendekatan soft system ini cocok digunakan dalam penelitian ini karena dapat melihat situasi sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai sudut pandang. Hal ini selaras dengan penelitian Suryaatmaja dan kawan-kawan^{29, 30}, yang menggunakan SSM karena perannya dalam mendukung eksplorasi suatu situasi dan menyelesaikan permasalahan terkait Agile Software Development dengan memanfaatkan diskusi terstruktur. SSM dinilai mampu memberikan fungsi akomodasi yang dapat menemukan versi situasi lain yang dapat diterima semua pihak.

Menurut Checkland & Poulter³¹, metodologi *Soft System* didasarkan pada gagasan bahwa situasi yang diamati manusia adalah bagian dari sistem aktivitas manusia, di mana kita dapat memilih satu atau lebih aktivitas yang relevan untuk dibandingkan dengan alam. Kajian yang ada membuktikan bahwa SSM dapat mendorong kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak. SSM diterapkan untuk memberikan cara baru dalam mengatasi permasalahan yang tumpang tindih sehingga tumbuh budaya kolaborasi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Menurut Budiarto dan kawan-kawan,³² SSM berperan sebagai metode yang tepat untuk mempelajari kolaborasi. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk memberikan pandangan luas mengenai dunia sosial yang saling bertentangan dan menemukan akomodasi yang relevan dengan dimensi organisasi dan mutualitas dalam proses kolaborasi. Menurut Bianchi et al., penerapan pendekatan *Soft System* sejalan dengan praktik tata kelola kolaboratif itu sendiri karena mampu meningkatkan dialog berkualitas tinggi

-
- 28 Choong-Ki Lee, Soo K Kang, and Yong-Ki Lee, “Segmentation of Mega Event Motivation: The Case of Expo 2010 Shanghai China,” *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 18, no. 6 (September 1, 2013): 637–660, <https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/10941665.2012.695287?scroll=top>.
 - 29 K. Suryaatmaja et al., “Exploring the Missing Framework of Agile Software Development Framework through Adaptation,” *International Journal of Recent Technology and Engineering* 7, no. 6 (2019): 259–263, <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v7i6s2/F10390476S219.pdf>.
 - 30 K. Suryaatmaja et al., “Uncovering the Failure of Agile Framework Implementation Using SSM-Based Action Research,” *Palgrave Communications* 6, no. 1 (2020): 1–18, <https://www.nature.com/articles/s41599-019-0384-9#citeas>.
 - 31 P Checkland and J Poulter, “‘Soft Systems Methodology’, in Reynolds, M. and Holwell, S. (Eds), *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*,” in *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*, Second Edi. (London: Springer-Verlag London Ltd, 2020), 201–253.
 - 32 Budiarto et al., “Constructing the Collaborative Working Relationships in One of the Big Four Firms,” *Systemic Practice and Action Research* 35, no. 5 (2022): 679–709, <https://link.springer.com/article/10.1007/s11213-021-09588-3>.

dan penyelarasan kebijakan antar organisasi yang terlibat.³³ Keberadaan SSM juga selaras dengan penerapan tata kelola kolaboratif yang dapat meminimalisir ambiguitas, mengelola konflik kepentingan yang ada, dan melanggengkan kepercayaan masing-masing pihak.³⁴ Kerangka studi yang digunakan akan didasarkan pada kerangka *Soft System* Checkland (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Metodologi Penelitian

Sumber: Diadopsi dari SSM Stages oleh Checkland & Poulter³⁵, 2006, 2020

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan studi dokumen untuk menangkap situasi problematis terkait program migrasi internasional. Ada tujuh tahapan metodologi *Soft System* yang diterapkan pada penelitian ini. Menurut Checkland dan Poulter, ketujuh tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1) situasi masalah dianggap problematis, (2) situasi masalah diungkapkan, (3) definisi akar kegiatan yang bertujuan, (4) model konseptual sistem yang disebutkan dalam definisi akar, (5) perbandingan model dan dunia nyata, (6) perubahan yang diinginkan secara sistematis dan layak secara budaya, (7) tindakan untuk memperbaiki situasi.³⁶

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tahap Satu: Situasi Masalah Dianggap Bermasalah

Kebutuhan masyarakat untuk melakukan migrasi dari Indonesia atau sebaliknya cukup beragam. Ada empat faktor utama yang melatarbelakangi alasan tersebut: alasan bekerja dan berbisnis di luar

33 Carmine Bianchi, Greta Nasi, and William C Rivenbark, "Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, and Challenges," *Public Management Review* 23, no. 11 (2021): 1581–1589, <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>.

34 Ibid.

35 S. (Eds) Checkland, P. and Poulter, J. in Reynolds, M. and Holwell, *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*, Second. (London: Springer-Verlag London, 2020). hal. 201-253

36 Peter Checkland, "Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective," *Systems research and behavioral science* 17, no. S1 (2000): S11–S58.

negeri, berobat ke rumah sakit luar negeri, pendidikan, atau sekedar menjalankan aktivitas liburan.³⁷ Motivasi tersebut juga didorong oleh semakin banyaknya usia produktif di Indonesia, sehingga kebutuhan masyarakat untuk bepergian ke luar negeri semakin meningkat. Namun Indonesia belum memiliki platform yang tepat untuk menyalurkan informasi dan komunikasi terkait aspek keimigrasian. Selama ini informasi terkait keimigrasian masih dijalankan secara independen oleh pihak-pihak tertentu melalui sarana masing-masing. Menurut penelitian yang dilakukan Laricha dkk, nilai pelayanan berdasarkan Indeks Kepuasan Warga Kantor Imigrasi Jakarta masih tergolong baik.³⁸ Indeks Kepuasan Masyarakat dalam segala parameter, baik persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, dan tarif, sangat baik. Sementara itu, peringkat buruk masih dapat dilihat pada parameter informasi, infrastruktur, respon, dan konsultasi lainnya, sesuai Gambar 2 di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, namun masih perlu memberikan perhatian lebih pada parameter penilaian yang buruk.

Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan pemerintah masih rendah dalam memberikan informasi dan pengawasan terhadap agen perjalanan luar negeri yang tidak bertanggung jawab: "Pemerintah harus berperan aktif dalam mengawasi bisnis agen perjalanan yang tidak bertanggung jawab dan banyak melakukan penipuan sehingga merugikan konsumen." Masyarakat pada umumnya sering mendapatkan perlakuan yang dirugikan baik dari segi waktu maupun materil dari praktik bisnis travel agent ilegal tanpa sepengetahuan konsumen. Tak hanya itu, kebutuhan akan informasi lebih lanjut mengenai rumitnya sistem migrasi juga berdampak pada pelaku usaha. Banyak investor dan wisatawan menyatakan kesulitan mendapatkan izin tinggal di Indonesia karena sistem imigrasi yang terpadu dan berbelit-belit. Salah satu kemungkinan penyebab kemacetan sistem imigrasi ini adalah sulitnya mengoordinasikan persetujuan visa dengan negara-negara rawan imigrasi.

Di sisi lain, dunia usaha Indonesia juga kesulitan menjalin kerja sama dengan pihak asing, meski pemerintah telah mengembangkan kebijakan yang memberikan kemudahan. Sulitnya mengakses investor asing disebabkan kurangnya link atau koneksi dengan pihak eksternal tersebut; seperti yang disampaikan para pengusaha dalam wawancaranya: "Kerja sama dengan pihak asing hanya akan mudah jika mempunyai link atau koneksi. Pemerintah harus bisa membangun jaringan untuk memfasilitasi kerja sama tersebut". Sebagai realisasinya, pemerintah telah mengeluarkan platform berbasis online bernama OSS untuk memberikan pelayanan terpadu terkait perizinan berusaha. Dalam wawancara mendalam dengan salah satu pelaku usaha, mereka menjelaskan: "Seringkali upaya pemerintah terhambat karena tidak sinkronnya implementasi; misalnya OSS terhambat karena tumpang tindih aturan akibat Omnibuslaw, ego sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menghambat kemudahan investor dalam berusaha."

-
- 37 Djoko Santoso, "Why Do You Enjoy Going Overseas for Treatment?," *Kompas.Id*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/english/2023/07/16/en-mengapa-senang-berobat-ke-luar-negeri>. diakses tanggal 27 Oktober 2023
- 38 Lithrone Laricha et al., *Pengukuran Dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Imigrasi Jakarta*, *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, vol. 6, (2018): 35-42, <https://journal.untar.ac.id/index.php/industri/article/view/3022>. including government institution such as the immigration office. This research took place at the immigration office in one of the areas in Jakarta that had the lowest level of community satisfaction. This study aims to measure the public response to the services of the immigration office in West Jakarta area with the hope that its quality of service can be improved. This research was conducted by using service quality and analysis theory such as, hypothesis testing, GAP analysis, Importance-Performance Matrix (IPA)



Gambar 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Desember 2022

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2022

Belum sinkronnya implementasi ini sangat disayangkan, mengingat pentingnya efisiensi bantuan teknis dalam mendukung layanan e-Government pada sistem imigrasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan setiap pengguna. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menilai pemerintah belum menciptakan tempat “satu atap” yang efektif sebagai pusat informasi keimigrasian, baik untuk urusan bisnis, pendidikan, maupun tempat tinggal tetap.

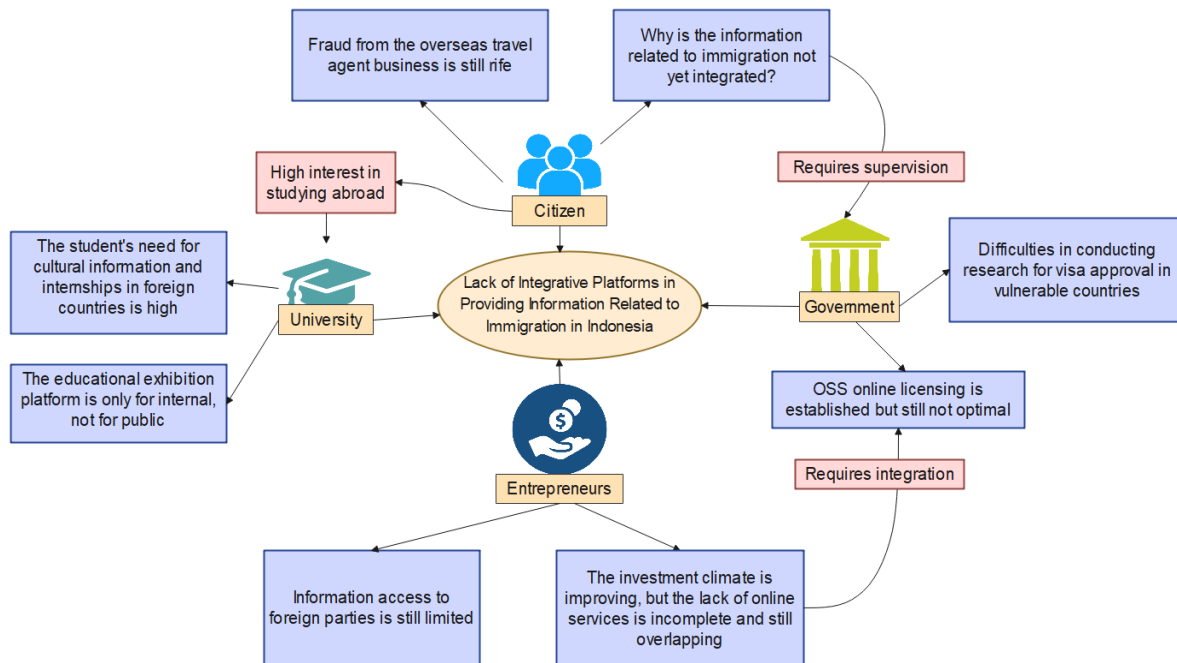
3.2 Tahap Kedua: Situasi Masalah Dinyatakan

Tahap kedua dari penelitian ini adalah mengubah situasi masalah yang kompleks menjadi jaringan informasi yang digambarkan dalam gambaran yang kaya.³⁹ Gambaran yang kaya dapat memberikan gambaran betapa rumitnya suatu permasalahan karena permasalahan keimigrasian melibatkan banyak kepentingan dengan kemampuan sumber daya yang berbeda-beda.⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk memberikan informasi terkait keimigrasian. Narasumber dari POLRI menjelaskan: “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memperbanyak pendirian kantor imigrasi di daerah, meningkatkan kelas kantor imigrasi, mendirikan rumah tahanan imigrasi, dan melalui Biro Humas melakukan kerjasama dengan media massa dan online media.” Permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum adanya layanan informasi yang terintegrasi dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi keimigrasian dari negara lain. Fenomena migrasi di Indonesia tergolong kompleks karena melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang kolaboratif untuk menganalisis situasi secara lebih luas dan menghasilkan kebijakan yang tepat. Permasalahan ini tidak hanya datang dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan migrasi. Ada interaksi antara pemerintah, pelaku usaha,

39 Checkland, P. and Poulter, J. in Reynolds, M. and Holwell, *Syst. Approaches to Mak. Chang. A Pract. Guid.* hal. 201-253

40 Alwi and Susanti, “Effectiveness of Managing Network Structure Through Local Collaborative Governance Capacity in The Implementation of Food Security Policy in Indonesia.” Vol. 6 no.6 (2022): 4496-4504, <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/8235>

dan masyarakat umum dalam situasi bermasalah ini. Penelitian ini menggunakan rich picture untuk menangkap fenomena tersebut, seperti digambarkan pada Gambar 3 secara komprehensif.



Gambar 3. Gambaran Kaya Fenomena Tata Kelola Strategis Keimigrasian di Indonesia

Sumber: Penulis, 2023

3.3 Tahap Ketiga: Definisi Sistem Relevan

Root definition merupakan tahapan selanjutnya untuk menggambarkan proses transformasi dan perubahan situasional yang mungkin dilakukan di dunia nyata. Berdasarkan gambaran kaya di atas, terlihat bahwa setiap pemangku kepentingan masih merasakan rumitnya sistem migrasi yang berbelit-belit. Menurut Nuriyanto, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang publik, pelayanan publik, dan pelayanan administrasi. khususnya di bidang imigrasi.⁴¹ Tao juga menyatakan bahwa pemerintah pusat memainkan peran penting dalam menyediakan pendanaan, bimbingan, dan koordinasi untuk memfasilitasi implementasi kebijakan imigrasi yang efektif di seluruh negeri⁴². Oleh karena itu, akar permasalahan dari situasi yang ada adalah peningkatan akses informasi dalam satu platform terintegrasi mengenai proses migrasi internasional. Langkah penting dalam meningkatkan pertukaran informasi adalah dengan menyelenggarakan platform terintegrasi yang dapat mempertemukan banyak pihak, seperti dunia usaha, perekrut, universitas, agen perjalanan, dan pemerintah, melalui Expo dan Konferensi. Tujuan utama acara ini adalah menciptakan jaringan informasi yang efektif dan efisien bagi pengunjung. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk menghindari tindakan korupsi karena setiap pihak terkait dapat bertatap muka tanpa batasan tertentu. Keberadaan forum ini juga penting dalam

41 Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?", *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 428–453, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1132>.

42 Jill L Tao, "National-Local Networks and Immigration Governance: Policy Distance in South Korea," *Croatian and Comparative Public Administration* 19, no. 3 (2019): 345–376, <https://hrcak.srce.hr/226336>.

menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan usaha, sehingga perlu diadakan pertemuan negara-negara terkait dalam memperoleh informasi aktual.⁴³ Selain itu, acara ini juga sejalan dengan prioritas sektor imigrasi Indonesia yang mendorong dan mendorong inovasi dengan melibatkan elemen masyarakat untuk mengembangkan perekonomian bangsa.⁴⁴ Menurut Gharaee et al., kekuatan paling krusial dalam menerapkan kemitraan publik-swasta adalah meningkatkan akses terhadap layanan, terutama bagi masyarakat marginal, meningkatkan kualitas layanan, dan memuaskan masyarakat yang terlibat.⁴⁵ Adanya acara ini dapat memenuhi tujuan tersebut, dimana akses informasi keimigrasian akan lebih merata, dan kualitas pelayanan juga dapat memuaskan calon pengunjung.

Pada bagian expo, acara ini akan mengundang kedutaan asing di Indonesia untuk membentuk stand stand. Setiap stand akan berisi informasi seperti universitas, tempat liburan, tempat ziarah, imigrasi, rumah sakit, dan lowongan kerja. Gagasan ini sejalan dengan temuan Hidalgo yang menyarankan suatu negara menyalurkan otoritas pengambilan keputusan terkait kepada lembaga internasional yang dapat diandalkan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan calon imigran.⁴⁶ Tidak hanya melakukan expo, kegiatan ini juga akan menyelenggarakan konferensi sebagai wadah kolaborasi dan diskusi dengan membahas isu-isu strategis dan aktual terkait keimigrasian. Berdasarkan pertimbangan root definition maka rumusan PQR adalah sebagai berikut: Membangun platform informasi all-in-one yang bersifat integratif dan kolaboratif dengan Kementerian, Kedutaan Besar di Indonesia, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, Masyarakat Umum, dan Event Organizer untuk menciptakan Expo dan Konferensi Keimigrasian Indonesia untuk mengoptimalkan penyebaran informasi keimigrasian yang efektif dan efisien. Kegiatan ini sangat tepat mengingat perkembangan era globalisasi mendukung prospek tumbuhnya industri MICE (Meetings, Incentives, Convention, and Exhibition)⁴⁷.

Dalam mengembangkan suatu perubahan, penelitian ini menggunakan analisis CATWOE (Clients, Actors, Transformation, Weltanschauung, Owners, and Environment) untuk menganalisis setiap peran dan proses dari tindakan yang diusulkan. Berikut analisis CATWOE terhadap definisi akar yang telah dibuat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Analisis CATWOE pada Definisi Root

Klien	Masyarakat umum
<i>Pelaku</i>	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Penyelenggara Acara, dan Kedutaan Besar.
<i>Transformasi</i>	Kurangnya akses terhadap informasi mengenai aspek-aspek terpadu dari migrasi internasional. Tingginya kesadaran dan pemahaman masyarakat lokal dan asing terhadap aspek keimigrasian di Indonesia

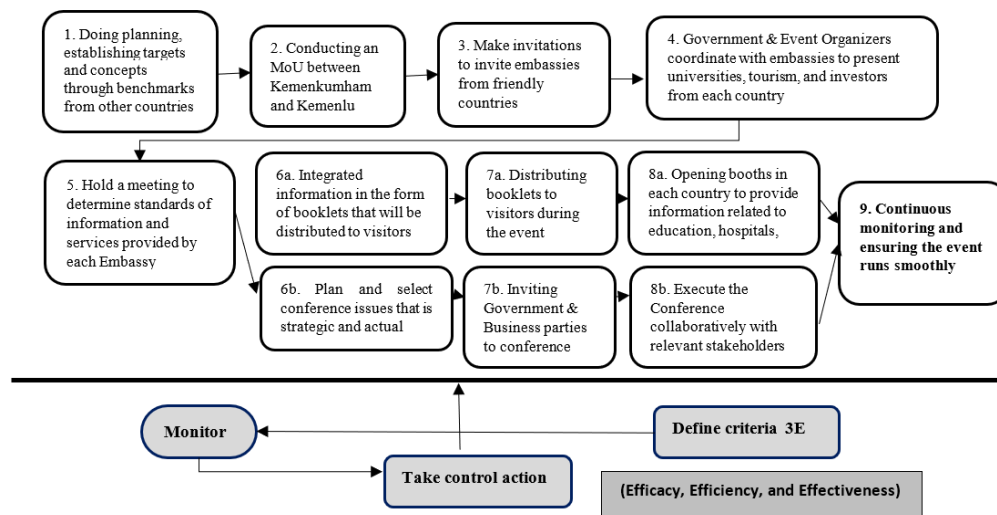
- 43 Maxedo Tenggara, Breeze Maringka, and Hamka, "Perancangan Konferensi Dan Pameran Di Kota Malang Tema: High-Tech Architecture," *Jurnal Pengilon* 3, no. 2 (2019): 47–58, <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/pengilon/article/view/3065>.
- 44 Antaranews.com, "Human Resource Development and Economic Improvement Become Immigration Priorities." <https://www.antaranews.com/berita/3365703/pengembangan-sdm-dan-peningkatan-ekonomi-jadi-prioritas-imigrasi>, diakses tanggal 27 Oktober 2023
- 45 Gharaee et al., "Public-Private Partnership in Primary Health Care: An Experience from Iran." *Primary Health Care Research and Development* 24, no. 3 (January 2023). <https://www.cambridge.org/core/journals/primary-health-care-research-and-development/article/publicprivate-partnership-in-primary-health-care-an-experience-from-iran/>.
- 46 Javier Hidalgo, "The Case for the International Governance of Immigration," *International Theory* 8, no. 1 (2016): 140–170, <https://www.cambridge.org/core/journals/international-theory/article/abs/case-for-the-international-governance-of-immigration>.
- 47 Tenggara, Maringka, and Hamka, "Perancangan Konferensi Dan Pameran Di Kota Malang Tema: High-Tech Architecture." *Jurnal Pengilon* 3, no. 2 (2019): 47–58, <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/pengilon/article/view/3065>.

<i>Weltanschauung</i>	Menciptakan kegiatan Expo dan Konferensi Imigrasi Indonesia yang dapat mengintegrasikan kebutuhan warga negara mengenai keimigrasian masing-masing negara dalam berbagai aspek yaitu pendidikan, pariwisata, izin tinggal, dan investasi.
<i>Pemilik</i>	Direktorat Jenderal Imigrasi
<i>Lingkungan</i>	Masalah peraturan dan biaya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sumber: Penulis, 2023

3.4 Mengembangkan Model Konseptual

Tahap ini mengembangkan model konseptual berdasarkan definisi akar. Dalam membangun Expo dan Konferensi Imigrasi Indonesia, berbagai pihak membangun beberapa tahapan. Berdasarkan model konseptual, proses perencanaan pada tahap pertama merupakan landasan penting dimana destinasi penyelenggara Expo & Conference harus menentukan kriteria dan standar internasional terbaik. Ada lima kriteria yang perlu dipenuhi, yakni meliputi aspek kebersihan, bandara sebagai pintu gerbang utama wisatawan, venue, prosedur yang jelas, dan pelayanan akomodasi.



Gambar 4. Model Konseptual Berdasarkan Definisi Akar

Sumber: Penulis, 2023

3.5 Tahap Lima: Perbandingan Model dengan Dunia Nyata

Stakeholder membandingkan model konseptual dengan dunia nyata melalui beberapa pertanyaan yaitu, “Apakah aktivitas dalam model terjadi di dunia nyata? Bagaimana aktivitas tersebut diwujudkan di dunia nyata? Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh perubahan yang dapat timbul dan mencapai konsensus yang tepat untuk menerapkan perubahan ini.

Tabel 2. Perbandingan Model dan Dunia Nyata

Aktivitas	Sudah Ada?	Bagaimana?	Siapa?	Baik atau buruk	Alternatif?
Melakukan perencanaan berupa target acara dan konsep melalui riset dari benchmark negara lain	<i>Ya</i>	Pemerintah sedang melakukan benchmark dalam menggelar konsep Trade Expo	Kementerian Perdagangan	<i>Baik</i>	Pemerintah dapat mengevaluasi pelaksanaan Expo Keimigrasian dari luar negeri.
Melakukan MoU antara Penyelenggara Acara dan Pemerintah	<i>Ya</i>	Pemerintah telah bekerjasama dengan Event Organizer untuk menyelenggarakan acara Trade Expo	Kementerian Perdagangan	<i>Baik</i>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat bekerja sama dengan penyelenggara terpercaya dalam mewujudkan Expo Keimigrasian
Mengundang Kedutaan Besar negara sahabat pada acara tersebut	<i>Tidak</i>				Menyelenggarakan acara Internasional dengan keterlibatan Kedutaan Besar
Pemerintah dan penyelenggara acara berkoordinasi dengan kedutaan untuk menghadirkan universitas, pariwisata, dan investor dari masing-masing negara	<i>Tidak</i>				Pemerintah lebih banyak terlibat dengan pemangku kepentingan lainnya dalam kerja sama
Mengadakan pertemuan untuk menentukan standar informasi dan pelayanan yang diberikan oleh KBRI	<i>Tidak</i>				Berkolaborasi dengan Kedutaan dalam menyebarkan informasi terkait keimigrasian masing-masing negara
Mengintegrasikan informasi dalam bentuk booklet	<i>Ya</i>	Imigrasi telah memiliki Buku Panduan mengenai proses imigrasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<i>Baik</i>	Pemerintah dapat menerbitkan booklet yang berisi informasi keimigrasian terpadu, termasuk informasi dari negara lain
Mendistribusikan booklet informasi terkait keimigrasian kepada pengunjung	<i>Tidak</i>				Mendistribusikan booklet informasi kepada pengunjung Pameran & Konferensi Imigrasi Indonesia
Membuka booth untuk masing-masing negara	<i>Tidak</i>				Setiap negara melalui kedutaan besarnya dapat memberikan informasi lengkap melalui booth.
Merencanakan dan memilih isu-isu konferensi yang aktual dan strategis	<i>Ya</i>	Kementerian telah aktif menyelenggarakan konferensi untuk membahas isu-isu tertentu	Kementerian di Indonesia	<i>Baik</i>	Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat membahas masalah keimigrasian secara lebih aktif dalam konferensi yang melibatkan negara lain.
Mengundang Pemerintah dan Pihak Bisnis ke Konferensi	<i>Ya</i>			<i>Baik</i>	
Penyelenggaraan konferensi secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan terkait	<i>Ya</i>			<i>Baik</i>	

Sumber: Penulis, 2023

3.6 Tahap Enam: Perubahan yang Diinginkan Secara Sistematis dan Layak Secara Budaya

Tahap selanjutnya dalam proses metodologi *Soft System* adalah menganalisis perubahan yang diinginkan secara sistematis dan layak berdasarkan aspek budaya. Jika dilihat secara sistematis, penyelenggaraan Expo dan Konferensi Keimigrasian Indonesia merupakan wujud perwujudan fungsi keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejalan dengan prioritas kerja Presiden Jokowi pasca reformasi birokrasi, antara lain percepatan pelayanan dan perizinan, penerapan pemikiran sistemik untuk menggantikan pemikiran monoton, dan peran adaptif yang produktif, inovatif dan kompetitif. Kedepannya, penyelenggaraan kegiatan Expo dan Konferensi secara kolaboratif merupakan wujud inovasi dan komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan fungsinya agar kegiatan tersebut “diinginkan secara sistematis”. Misalnya saja penyelenggaraan “The 2023 Global Immigration Expo US” di Miami, Amerika Serikat, pada Januari 2023. Acara ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dari para pemimpin industri dan diharapkan dapat mempertemukan para profesional global di bidang imigrasi investasi dan pengelolaan kekayaan. Konferensi ini akan menampilkan panel interaktif yang dimoderatori oleh para profesional imigrasi dan migrasi global yang berpengalaman.

Secara kultural, penyelenggaraan kegiatan Indonesia Expo and Conference mempunyai unsur kebaruan dan membuka peluang baru bagi berbagai pihak. Kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Investor Asing, Kedutaan Besar, Instansi Pendidikan, dan Pihak Swasta.

3.7 Tahap Tujuh: Tindakan untuk Memperbaiki Situasi

Tahap ini merupakan isi dari tindakan yang digunakan untuk memperbaiki masalah. Keberhasilan penyelenggaraan Expo dan Konferensi Keimigrasian Indonesia memerlukan tata kelola yang kolaboratif antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri untuk bekerja sama dengan Kedutaan Besar dan Penyelenggara Acara yang memiliki visi dan tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat umum sebagai sasaran pengunjung juga perlu berperan aktif dengan berpartisipasi aktif dalam expo.

Kebaruan penelitian ini adalah rekomendasi untuk menyelenggarakan Expo dan Konferensi Imigrasi Indonesia sebagai wadah tata kelola strategis terpadu dan tata kelola kolaboratif untuk memberikan informasi yang benar tentang keimigrasian di Indonesia. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Keimigrasian berupa kebijakan “*Golden Visa*”, perubahan jangka waktu pemberian visa dan izin tinggal diharapkan dapat lebih menarik investasi asing. Acara ini dapat menjadi perekat dalam membangun jejaring sosial karena mempertemukan kedutaan, pelaku bisnis, universitas, dan instansi pariwisata dalam satu tempat.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Immigration Indonesia Expo and Conference merupakan salah satu wujud perwujudan fungsi keimigrasian dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejalan dengan prioritas kerja Presiden Jokowi pasca reformasi birokrasi, termasuk percepatan pelayanan dan perizinan. Kerja sama penyelenggaraan Expo dan Conference ini merupakan wujud inovasi dan komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan fungsinya sehingga kegiatan ini dapat dikatakan “diinginkan secara sistematis”. Secara kultural, kegiatan Indonesia Expo and Conference juga layak dilakukan karena memiliki unsur

kebaruan dan membuka peluang baru bagi berbagai pihak. Kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Investor Asing, Kedutaan Besar Negara, Institusi Pendidikan, dan Pihak Swasta. Apalagi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2023 yang salah satunya terkait kebijakan skema emas visa sehingga bisa memperpanjang jangka waktu pemberian visa dan izin tinggal hingga 10 tahun. Kebijakan baru ini dapat menarik lebih banyak investasi asing. Dengan demikian, penyelenggaraan Expo dan Konferensi Imigrasi Indonesia dapat menjadi alternatif platform terintegrasi untuk meningkatkan penyebaran informasi keimigrasian secara lebih terintegrasi dengan tata kelola strategis dan tata kelola kolaboratif. Ajang besar bertaraf internasional ini diharapkan dapat menjadi jejaring sosial yang mempertemukan Kedutaan Besar, Dunia Usaha, Universitas, dan Instansi Pariwisata dalam satu tempat. Studi ini merekomendasikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendorong desain tata kelola strategis dan tata kelola kolaboratif menjadi lebih strategis dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH (WAJIB)

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan di Fakultas Ilmu Administrasi atas masukan dan dukungannya yang sangat membantu. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Amy Y. Rahayu dan Dr. Andro Wahyudi atas kontribusinya yang sangat berharga terhadap artikel kami. Ucapan terima kasih juga patut disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Yasonna H. Laoly, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Radita Salsabila dan seluruh mitra intelektual yang telah memberikan bantuan dan bantuan bagi peneliti dalam menyelesaikan artikel ini.

REFERENSI

- Alwi, and Gita Susanti. "Effectiveness of Managing Network Structure Through Local Collaborative Governance Capacity in The Implementation of Food Security Policy in Indonesia." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 6 (2022): 4496–4504. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/8235>.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–571. <https://academic.oup.com/jpart/article/18/4/543/1090370>.
- . "Collaborative Platforms as a Governance Strategy." *Journal of Public Administration Research and Theory* 28, no. 1 (2018): 16–32. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044157457&doi=10.1093%2Fjpart%2Fmux030&partnerID=40&md5=128b8acac0625ea95c2ad78faf064a62>.
- Antaranews.com. "Human Resource Development and Economic Improvement Become Immigration Priorities." Last modified January 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3365703/pengembangan-sdm-dan-peningkatan-ekonomi-jadi-prioritas-imigrasi>.
- Bianchi, Carmine, Greta Nasi, and William C Rivenbark. "Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, and Challenges." *Public Management Review* 23, no. 11 (2021): 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>.
- Budiarso, U.S. Putro, Y. Sunitiyoso, and R. Fitriati. "Constructing the Collaborative Working Relationships in One of the Big Four Firms." *Systemic Practice and Action Research* 35, no. 5 (2022): 679–709. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11213-021-09588-3>.
- Checkland, P. and Poulter, J. in Reynolds, M. and Holwell, S. (Eds). *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*. Second. London: Springer-Verlag London, 2020.
- Checkland, P, and J Poulter. "'Soft Systems Methodology', in Reynolds, M. and Holwell, S. (Eds), *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*." In *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*, 201–253. Second Edi. London: Springer-Verlag London Ltd, 2020.

- Checkland, Peter. "Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective." *Systems research and behavioral science* 17, no. S1 (2000): S11–S58.
- Christina L Rudatin, Annisa Wardhani, and Fauzi Mubarak. "Analisis Kriteria Destinasi Penyelenggaraan Wisata Bisnis (MICE) Pada Masa Pandemi COVID-19." In *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, edited by Politeknik Negeri Jember, 7:196–207. Indonesian Society of Applied Science (ISAS), 2021. <https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/1046>.
- Davies, Wayne K D. "Festive Cities: Multi-Dimensional Perspectives." *Theme cities: solutions for urban problems* (2015): 533–561. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9655-2_14.
- Devi, E.T., D. Wibisono, N.B. Mulyono, and R. Fitriati. "Designing an Information-Sharing System to Improve Collaboration Culture: A Soft Systems Methodology Approach in the Digital Service Creation Process." *Journal of Enterprise Information Management* 36, no. 5 (2023): 1240–1269. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-08-2022-0294/full/html>.
- Diedrich, Andreas, Ulla Eriksson-Zetterquist, and Alexander Styhre. "Sorting People out: The Uses of One-Dimensional Classificatory Schemes in a Multi-Dimensional World." *Culture and Organization* 17, no. 4 (2011): 271–292. e: <https://www.tandfonline.com/loi/gsc020>.
- Dror, Y. "Strategic Brain for Central Government." In *The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe*, 15–27. Bratislava: NISPAcee, 2004.
- Dwi Hadya Jayani. "Berlibur, Tujuan Utama Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri Saat Pandemi." *Databoks*. Last modified December 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/29/berlibur-tujuan-utama-penduduk-indonesia-ke-luar-negeri-saat-pandemi44>.
- Eifert, Benjamin P. *Do Regulatory Reforms Stimulate Investment and Growth? Evidence from the Doing Business Data, 2003–07*. Washington D.C, 2009. <http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1420894>.
- Gharace, Hojatolah, Saber Azami Aghdash, Mostafa Farahbakhsh, Majid Karamouz, Shirin Nosratnejad, and Jafar Sadegh Tabrizi. "Public-Private Partnership in Primary Health Care: An Experience from Iran." *Primary Health Care Research and Development* 24, no. 3 (January 2023). <https://www.cambridge.org/core/journals/primary-health-care-research-and-development/article/publicprivate-partnership-in-primary-health-care-an-experience-from-iran/>.
- Gunn, Alexander. "Immigration and Integration Policy and the Complexity of Multi-Level Governance: A Case Study of British Columbia." *Journal of Borderlands Studies* 35, no. 4 (August 2020): 603–618. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08865655.2019.1619472?journalCode=rjbs20>.
- Hidalgo, Javier. "The Case for the International Governance of Immigration." *International Theory* 8, no. 1 (2016): 140–170. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-theory/article/abs/case-for-the-international-governance-of-immigration>.
- Horne, John. "The Four 'Knowns' of Sports Mega-Events." *Leisure Studies* 26, no. 1 (January 2007): 81–96. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02614360500504628>.
- Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. "Siaran Pers : Imigrasi Cetak PNPB 4,5 Triliun Dan Sederet Terobosan Layanan Di Tahun 2022," December 2022. <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/12/30/siaran-pers-imigrasi-cetak-pnbp-45-triliun-dan-sederet-terobosan-layanan-di-tahun-2022/>.
- Laricha, Lithrone, Wilson Kosasih, Dan Tri, and Rama Permai. *Pengukuran Dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Imigrasi Jakarta. Jurnal Ilmiah Teknik Industri*. Vol. 6, 2018. <https://journal.untar.ac.id/index.php/industri/article/view/3022>.
- Lee, Choong-Ki, Soo K Kang, and Yong-Ki Lee. "Segmentation of Mega Event Motivation: The Case of Expo 2010 Shanghai China." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 18, no. 6 (September 1, 2013): 637–660. <https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/10941665.2012.695287?scroll=top>.
- Lee, Choong Ki, Soo K Kang, and Yong Ki Lee. "Segmentation of Mega Event Motivation: The Case of Expo 2010 Shanghai China." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 18, no. 6 (September 2013): 637–660. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10941665.2012.695287>.
- Müller, Martin. "What Makes an Event a Mega-Event? Definitions and Sizes." *Leisure Studies* 34, no. 6 (November 2015): 627–642. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02614367.2014.993333>.

- Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 428–453. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1132>.
- OECD.org. *Public-Private Cooperation Tools: Build Trust Strategic Governance*, 2022. <https://www.oecd.org/trade/resilient-supply-chains/strategic-governance/>.
- Potůček, M, and Příkryl J. "Strategické Vládnutí a Česká Republika Poroce 1989. [Strategic Governance and the Czech Republic after 1989]." In *Potůček, M. et Al. Strategické Vládnutí a Česká Republika. (Strategic Governance and the Czech Republic)*, 125–136. Praha: Grada, 2007.
- Rossa, Vania. "Indonesia Jadi Salah Satu Negara Dengan Jumlah Siswa Belajar Di Luar Negeri Terbanyak Di Tahun 2021." <https://www.suara.com/lifestyle/2022/07/25/121810/Indonesia-Jadi-Salah-Satu-Negara-Dengan-Jumlah-Siswa-Belajar-Di-Luar-Negeri-Terbanyak-Di-Tahun-2021>, July 2022.
- Santoso, Djoko. "Why Do You Enjoy Going Overseas for Treatment?" *Kompas.Id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/07/16/en-mengapa-senang-berobat-ke-luar-negeri>.
- Santoso, M Iman. "Applying Interactive Planning on Public Service Leadership in the Directorate General of Immigration Indonesia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 169 (January 2015): 400–410. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815003638>.
- Setiawan, Achmad. "Implementasi Fungsi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Implementation of Immigration Function for Protection of Indonesian Migrant Workers)." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 1 (2020): 1–11. <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/109>.
- Śledzik, Karol. "Schumpeter's View On Innovation And Entrepreneurship Schumpeter's View On Innovation And Entrepreneurship." *Management Trends in Theory and Practice* (2013). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257783.
- Suryaatmaja, K., D. Wibisono, A. Ghazali, and R. Fitriati. "Exploring the Missing Framework of Agile Software Development Framework through Adaptation." *International Journal of Recent Technology and Engineering* 7, no. 6 (2019): 259–263. <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v7i6s2/F10390476S219.pdf>.
- . "Uncovering the Failure of Agile Framework Implementation Using SSM-Based Action Research." *Palgrave Communications* 6, no. 1 (2020): 1–18. <https://www.nature.com/articles/s41599-019-0384-9#citeas>.
- Tao, Jill L. "National-Local Networks and Immigration Governance: Policy Distance in South Korea." *Croatian and Comparative Public Administration* 19, no. 3 (2019): 345–376. <https://hrcak.srce.hr/226336>.
- Tenggara, Maxedo, Breeze Maringka, and Hamka. "Perancangan Konferensi Dan Pameran Di Kota Malang Tema: High-Tech Architecture." *Jurnal Pengilon* 3, no. 2 (2019): 47–58. <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/pengilon/article/view/3065>.
- De Vries, M, and J Nemec. "Public Sector Reform: An Overview of Recent Literature and Research on NPM and Alternative Paths." *International Journal of Public Sector Management* 26, no. 1 (2013): 4–16.
- Wang, Ying, and Xin Jin. "Event-Based Destination Marketing: The Role of Mega-Events." *Event Management* 23, no. 1 (2019): 109–118. <https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/384421/Wang207630.pdf?sequence=1>.
- Wasem, Ruth. "Immigration Governance for the Twenty-First Century." *Journal on Migration and Human Security* 6, no. 1 (2018): 97–120. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/233150241800600105>.
- Worldometers. "South-Eastern Asia Population." <https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/>.
- Alwi, and Gita Susanti. "Effectiveness of Managing Network Structure Through Local Collaborative Governance Capacity in The Implementation of Food Security Policy in Indonesia." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 6 (2022): 4496–4504. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/8235>.

- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–571. <https://academic.oup.com/jpart/article/18/4/543/1090370>.
- . "Collaborative Platforms as a Governance Strategy." *Journal of Public Administration Research and Theory* 28, no. 1 (2018): 16–32. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044157457&doi=10.1093%2Fjpart%2Fmux030&partnerID=40&md5=128b8acac0625ea95c2ad78faf064a62>.
- Antaranews.com. "Human Resource Development and Economic Improvement Become Immigration Priorities." Last modified January 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3365703/pengembangan-sdm-dan-peningkatan-ekonomi-jadi-prioritas-imigrasi>.
- Bianchi, Carmine, Greta Nasi, and William C Rivenbark. "Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, and Challenges." *Public Management Review* 23, no. 11 (2021): 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>.
- Budiarso, U.S. Putro, Y. Sunitiyoso, and R. Fitriati. "Constructing the Collaborative Working Relationships in One of the Big Four Firms." *Systemic Practice and Action Research* 35, no. 5 (2022): 679–709. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11213-021-09588-3>.
- Checkland, P. and Poulter, J. in Reynolds, M. and Holwell, S. (Eds). *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*. Second. London: Springer-Verlag London, 2020.
- Checkland, P. and J Poulter. "'Soft Systems Methodology', in Reynolds, M. and Holwell, S. (Eds), *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*." In *Systems Approaches to Making Change: A Practical Guide*, 201–253. Second Edi. London: Springer-Verlag London Ltd, 2020.
- Checkland, Peter. "Soft Systems Methodology: A Thirty Year Retrospective." *Systems research and behavioral science* 17, no. S1 (2000): S11–S58.
- Christina L Rudatin, Annisa Wardhani, and Fauzi Mubarak. "Analisis Kriteria Destinasi Penyelenggaraan Wisata Bisnis (MICE) Pada Masa Pandemi COVID-19." In *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, edited by Politeknik Negeri Jember, 7:196–207. Indonesian Society of Applied Science (ISAS), 2021. <https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/1046>.
- Davies, Wayne K D. "Festive Cities: Multi-Dimensional Perspectives." *Theme cities: solutions for urban problems* (2015): 533–561. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9655-2_14.
- Devi, E.T., D. Wibisono, N.B. Mulyono, and R. Fitriati. "Designing an Information-Sharing System to Improve Collaboration Culture: A Soft Systems Methodology Approach in the Digital Service Creation Process." *Journal of Enterprise Information Management* 36, no. 5 (2023): 1240–1269. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEIM-08-2022-0294/full/html>.
- Diedrich, Andreas, Ulla Eriksson-Zetterquist, and Alexander Styhre. "Sorting People out: The Uses of One-Dimensional Classificatory Schemes in a Multi-Dimensional World." *Culture and Organization* 17, no. 4 (2011): 271–292. e: <https://www.tandfonline.com/loi/gsc020>.
- Dror, Y. "Strategic Brain for Central Government." In *The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe*, 15–27. Bratislava: NISPAcee, 2004.
- Dwi Hadya Jayani. "Berlibur, Tujuan Utama Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri Saat Pandemi." *Databoks*. Last modified December 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/29/berlibur-tujuan-utama-penduduk-indonesia-ke-luar-negeri-saat-pandemi44>.
- Eifert, Benjamin P. *Do Regulatory Reforms Stimulate Investment and Growth? Evidence from the Doing Business Data, 2003-07*. Washington D.C, 2009. <http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1420894>.
- Gharaee, Hojatolah, Saber Azami Aghdash, Mostafa Farahbakhsh, Majid Karamouz, Shirin Nosratnejad, and Jafar Sadegh Tabrizi. "Public-Private Partnership in Primary Health Care: An Experience from Iran." *Primary Health Care Research and Development* 24, no. 3 (January 2023). <https://www.cambridge.org/core/journals/primary-health-care-research-and-development/article/publicprivate-partnership-in-primary-health-care-an-experience-from-iran/>.

- Gunn, Alexander. "Immigration and Integration Policy and the Complexity of Multi-Level Governance: A Case Study of British Columbia." *Journal of Borderlands Studies* 35, no. 4 (August 2020): 603–618. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08865655.2019.1619472?journalCode=rjbs20>.
- Hidalgo, Javier. "The Case for the International Governance of Immigration." *International Theory* 8, no. 1 (2016): 140–170. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-theory/article/abs/case-for-the-international-governance-of-immigration>.
- Horne, John. "The Four 'Knowns' of Sports Mega-Events." *Leisure Studies* 26, no. 1 (January 2007): 81–96. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02614360500504628>.
- Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. "Siaran Pers : Imigrasi Cetak PNPB 4,5 Triliun Dan Sederet Terobosan Layanan Di Tahun 2022," December 2022. <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/12/30/siaran-pers-imigrasi-cetak-pnpb-45-triliun-dan-sederet-terobosan-layanan-di-tahun-2022/>.
- Laricha, Lithrone, Wilson Kosasih, Dan Tri, and Rama Permai. *Pengukuran Dan Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Imigrasi Jakarta. Jurnal Ilmiah Teknik Industri*. Vol. 6, 2018. <https://journal.untar.ac.id/index.php/industri/article/view/3022>.
- Lee, Choong-Ki, Soo K Kang, and Yong-Ki Lee. "Segmentation of Mega Event Motivation: The Case of Expo 2010 Shanghai China." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 18, no. 6 (September 1, 2013): 637–660. <https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/10941665.2012.695287?scroll=top>.
- Lee, Choong Ki, Soo K Kang, and Yong Ki Lee. "Segmentation of Mega Event Motivation: The Case of Expo 2010 Shanghai China." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 18, no. 6 (September 2013): 637–660. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10941665.2012.695287>.
- Müller, Martin. "What Makes an Event a Mega-Event? Definitions and Sizes." *Leisure Studies* 34, no. 6 (November 2015): 627–642. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02614367.2014.993333>.
- Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 428–453. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1132>.
- OECD.org. *Public-Private Cooperation Tools: Build Trust Strategic Governance*, 2022. <https://www.oecd.org/trade/resilient-supply-chains/strategic-governance/>.
- Potůček, M, and Příkryl J. "Strategické Vládnutí a Česká Republika Poroce 1989. [Strategic Governance and the Czech Republic after 1989]." In *Potůček, M. et Al. Strategické Vládnutí a Česká Republika. (Strategic Governance and the Czech Republic)*, 125–136. Praha: Grada, 2007.
- Rossa, Vania. "Indonesia Jadi Salah Satu Negara Dengan Jumlah Siswa Belajar Di Luar Negeri Terbanyak Di Tahun 2021." <https://www.suara.com/Lifestyle/2022/07/25/121810/Indonesia-Jadi-Salah-Satu-Negara-Dengan-Jumlah-Siswa-Belajar-Di-Luar-Negeri-Terbanyak-Di-Tahun-2021>, July 2022.
- Santoso, Djoko. "Why Do You Enjoy Going Overseas for Treatment?" *Kompas.Id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/07/16/en-mengapa-senang-berobat-ke-luar-negeri>.
- Santoso, M Iman. "Applying Interactive Planning on Public Service Leadership in the Directorate General of Immigration Indonesia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 169 (January 2015): 400–410. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815003638>.
- Setiawan, Achmad. "Implementasi Fungsi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Implementation of Immigration Function for Protection of Indonesian Migrant Workers)." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 1 (2020): 1–11. <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/109>.
- Śledzik, Karol. "Schumpeter's View On Innovation And Entrepreneurship Schumpeter's View On Innovation And Entrepreneurship." *Management Trends in Theory and Practice* (2013). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2257783.
- Suryaatmaja, K., D. Wibisono, A. Ghazali, and R. Fitriati. "Exploring the Missing Framework of Agile Software Development Framework through Adaptation." *International Journal of Recent Technology and Engineering* 7, no. 6 (2019): 259–263. <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v7i6s2/F10390476S219.pdf>.

- . “Uncovering the Failure of Agile Framework Implementation Using SSM-Based Action Research.” *Palgrave Communications* 6, no. 1 (2020): 1–18. <https://www.nature.com/articles/s41599-019-0384-9#citeas>.
- Tao, Jill L. “National-Local Networks and Immigration Governance: Policy Distance in South Korea.” *Croatian and Comparative Public Administration* 19, no. 3 (2019): 345–376. <https://hrcak.srce.hr/226336>.
- Tenggara, Maxedo, Breeze Maringka, and Hamka. “Perancangan Konferensi Dan Pameran Di Kota Malang Tema: High-Tech Architecture.” *Jurnal Pengilon* 3, no. 2 (2019): 47–58. <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/pengilon/article/view/3065>.
- De Vries, M, and J Nemec. “Public Sector Reform: An Overview of Recent Literature and Research on NPM and Alternative Paths.” *International Journal of Public Sector Management* 26, no. 1 (2013): 4–16.
- Wang, Ying, and Xin Jin. “Event-Based Destination Marketing: The Role of Mega-Events.” *Event Management* 23, no. 1 (2019): 109–118. <https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/384421/Wang207630.pdf?sequence=1>.
- Wasem, Ruth. “Immigration Governance for the Twenty-First Century.” *Journal on Migration and Human Security* 6, no. 1 (2018): 97–120. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/233150241800600105>.
- Worldometers. “South-Eastern Asia Population.” <https://www.worldometers.info/world-population/south-eastern-asia-population/>.